

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Tjipto. (2011). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Unpad, Bandung
- Bardach, Eugene. (1977). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congerisonal Quaterly Press
- Harsono. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya
- Hartatik, Indah Puji. (2014). *Buku Pintar Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur)*. Yogyakarta: Flashbooks.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia PER/21/M-PAN/11/2008. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor: 35 Tahun 2012. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*.
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor: 8 Tahun 2021. *Pedoman Penggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Kota Padang Panjang*.
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor: 9 Tahun 2019. *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Kota Padang Panjang*.
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor: 58 Tahun 2021. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah*.

Sulistiani, Ayu Siami. (2016). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan*. E-journal Ilmu Pemerintahan.

Syarif, Nurazizah. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur*.

Sutujo. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.

Vinesa, Tri Ananda. (2018). *SOP dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) di Kantor Walikota Padang*.

Waliah, Frilia Dera. (2015). *Analisis kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual*.

